PERANAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM MEMENUHI TUNTUTAN DUNIA KERJA

Ujang Charda S.
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Subang (UNSUB)
Email : ujangch@gmail.com

Abstract

The role of higher education in law there are three responsibilities, universities, namely education, research and community service. Through dharma education, higher education law is expected to forge and produce skilled human resources who have the knowledge, so that will be donated to the community, nation and state. Through dharma research, higher education law was expected to make innovations that are useful for national development. Through the third dharma is the law of higher education acts as a motivator, mediator, problem solver, and catalyst between government interests on the one hand and the needs of society on the other. Thus, the higher education law as a vehicle and simultaneously shape the scientific community participation in development, especially development in the field of labor. Through this education, it is directed to be developed and modern nation, among others, characterized by high menunjung attitude of professionalism, respect excellence, efficiency, has a work ethic, be disciplined and have a high sense of time, aware of science and technology, constantly renew themselves through studying.

Keywords: *Role of Education - Employment*

A. Pendahuluan

Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang sasaran utamanya diarahkan kepada peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai penunjang, antara lain lembaga pendidikan yang mendorong dan menggerakkan berbagai pembangunan di bidang pendidikan. Dalam pembangunan pendidikan, peranan lembaga pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam menunjang pembangunan tersebut. Oleh karena itu, sasaran umum pembangunan di bidang pendidikan pada hakekatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar pendidikan tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan gengsi semata, melainkan pendidikan dipandang juga sebagai sarana pembaharuan

masyarakat. Pendidikan tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan pendidikan harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan.

Pendidikan merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat, karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional pendidikan juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya. Apabila dilihat secara sosiologis perangkat aturan pendidikan telah menjelmakan dirinya menjadi *responsive* berarti yang termaju dalam fase perkembangan pendidikan. Pendidikan berkembang dari *repressive* menjadi *autonomous* dan kemudian berbentuk *responsive*. Dalam merespon kepentingan masyarakat, pendidikan tidak selalu hanya menyediakan perangkatnya persis seperti apa

yang terjadi dalam masyarakat, tetapi pendidikan harus memberi bentuk kepada masyarakat, yakni menyediakan *plat form* ke arah tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Pendidikan tidak semata-mata reaktif melainkan mesti juga proaktif. Dalam konteks ini, pendidikan akan berperan secara tut wuri handayani atau yang dikenal juga dengan istilah *tool of social engineering*. Atas dasar itu, maka dalam pembangunan pendidikan haruslah *future oriented*, dan seyogyanya diikuti oleh *future analysis* yang komprehensif dan imitigatif dari setiap fenomena yang ada, karena hal tersebut sangat krusial dan tensi dari perkembangan pendidikan begitu cepat.

E.F. Scumacher¹ mengemukakan, bahwa pendidikan adalah yang terpenting, dilihat dari penerapannya, maka pendidikan adalah kunci untuk segalanya. Sementara itu, Sayidiman Suryohadiprodo salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan investasi *intellectual capital* yang diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.² Senada dengan pendapat tersebut, Sanusi memandang pendidikan sebagai proses pengembangan sumber daya manusia yang merupakan faktor paling penting dalam pembangunan nasional.³ Bahkan pendidikan dapat dikatakan sebagai wahana yang paling strategis, karena harapan dapat mempersiapkan generasi muda yang sadar PITEKS, kreatif dan memiliki solidaritas sebagai gambaran manusia modern masa depan.⁴ Pendidikan merupakan wahana yang paling efektif dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan orang

perorang atau pemanfaatan hasil-hasil pendidikan, akan tetapi lebih difokuskan kepada pemuasan berbagai kebijaksanaan pengembangan daya insani modal terpenting yang dimiliki suatu negara.

Beberapa ahli ekonomi meyakini bahwa pendidikan dapat memecahkan masalah-masalah kemiskinan, rendahnya produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang lambat di suatu negara. Kesejahteraan suatu masyarakat bisa dicapai dengan memperbaiki tingkat pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan (*skill*) seseorang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Masyarakat yang terdidik dianggap merupakan kunci tercapainya kemakmuran. Di pihak lain masyarakat sendiri berpendapat bahwa pendidikan merupakan jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan tingkat upah yang lebih baik di samping dapat meningkatkan derajat seseorang.⁵

Pendidikan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan yang berperan membentuk manusia menjadi ahli di suatu bidang tertentu, maka dari lembaga ini, tidak saja akan lahir para ilmuwan-ilmuwan kaliber dunia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lahir pula para cendekiawan yang kemudian menjadi teknokrat yang mampu merubah peradaban suatu bangsa, bahkan peradaban dunia dan dari lembaga pendidikan ini pula, lahir karya-karya besar yang menjadi bahan baku penciptaan nilai-nilai ekonomi, sosial dan politik, kemasyarakatan, hukum dan nilai-nilai manajemen yang setiap saat bergerak maju. Menyadari dan meyakini sedalam-

¹ E.F. Scumacher dalam Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 40.

² Sayidiman Suryohadiprodo, *Studi Mutu Pendidikan Dasar*, Pusat Infomatika Balitbang Depdikbud, Jakarta, 1991, hlm. 23.

³ Sanusi, *Struktur Ketenagakerjaan di Indonesia*, LDFE-UI, Jakarta, 1989, hlm. 45.

⁴ Detama, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, UGM Press, 1990, hlm. 110.

⁵ Jhing Han, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (terjemahan D. Guritro), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 313.

dalamnya tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa hanya akan dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu dan merata; pendidikan yang efisien dalam arti mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan dan daya tersedia yang sekecil-kecilnya dan yang efektif, dalam arti mencapai tujuan seperti yang digariskan.

Atas dasar tersebut, strategi pelaksanaan pendidikan yang ingin berhasil memerlukan komitmen politik pemerintah pusat dan daerah di dalam pelaksanaan dan pengelolaannya. Tanpa adanya komitmen politik yang memadai, sukar diharapkan keberhasilan di bidang pembangunan pendidikan. Dengan dinyatakannya komitmen tersebut, maka pendidikan sebagai kunci dari keberhasilan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan kebudayaan, sehingga pendidikan ini harus mampu mewujudkan diri sebagai *agent of change* atau pembawa pembaharuan dalam mempengaruhi masyarakat sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (*social planning*) yang mengarah pada pembentukan insan yang *rakhmatan lil'alamin*.

B. Pembahasan

1. Strategi Pendidikan Tinggi Hukum dalam Memenuhi Tuntutan Kebutuhan Dunia Kerja

Kajian pendidikan modern, perguruan

tinggi sebagai organisasi terbuka perlu mengembangkan paradigma baru dalam mewujudkan lembaganya sebagai *high quality of educational institution*.⁶ Oleh karena itu, sebagai acuan nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas telah menetapkan HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) 2005-2015 sebagai pilar utama pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia untuk jangka panjang. Pilar tersebut mencakup:

- a. Perguruan tinggi harus memiliki daya saing nasional.
- b. Perguruan tinggi harus mengembangkan daya saing global.
- c. Perguruan tinggi harus memiliki organisasi yang sehat.

Untuk mendukung dan merealisasikan pencapaian pilar tersebut, maka pendidikan tinggi hukum harus mengembangkan sistem pendidikan dan layanan pembelajaran yang bermutu yang mengacu pada model pembelajaran yang dirumuskan oleh UNESCO, bahwa dalam pendidikan perlu dilaksanakan cara belajar dengan menggunakan "*the four pillars of education*", yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*. Dalam uraiannya yang lebih rinci, dijelaskan perlunya pilar *learning to know* berlanjut dengan *learning to learn* dan *learning through the whole life*. Model pendidikan UNESCO tersebut diaktualisasikan pada kurikulum pendidikan tinggi dengan adanya mata kuliah wajib sebagai mata kuliah

⁶ Udin S. Saud, "Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Penyediaan SDM untuk Pembangunan Berbasis Gotong Royong di Kabupaten Subang", Orasi Ilmiah pada Wisuda I UNSUB, Subang, 19 April 2006, hlm. 9.

pengembangan kepribadian (MPK) yang merupakan penjabaran dari simbol "*homo ethicus*", dan mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) sebagai simbol "*homo juridicus*".⁷

Selanjutnya secara konseptual, pengembangan pendidikan tinggi hukum dapat menggunkan konsep LRAISE sebagai acuan pengembangan program dan manajemen kelembagaannya. Konsep LRAISE adalah pola pengembangan manajemen pendidikan tinggi hukum yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut, yaitu *Leadership, Relevance, Academic Environment, Internal Management, Sustainability* dan *Effectivity dan Efficiency*.⁸ Pendidikan dapat dikatakan sebagai wahana yang paling strategis karena diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda yang sadar PITEK, kreatif dan memiliki solidaritas etis sebagai gambaran manusia Indonesia masa depan. Ada 4 (empat) strategi pendidikan nasional, yaitu pemerataan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan dan pembangunan, peningkatan kualitas, dan efisiensi pendidikan.⁹ Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya strategi kebersamaan melalui sikap gotong royong yang di dalamnya melekat nilai yang luhur, yaitu *nilai kemaslahatan* (kebaikan, kebajikan dan hikmah) bagi semua insan.¹⁰

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar untuk

mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia sehingga memperoleh nilai lebih untuk mandiri baik secara individual maupun warga masyarakat dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, pendidikan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk merekonstruksi dan memperbaiki masyarakat melalui pendidikan warganya. Sistem pendidikan nasional menyoroti tentang isu untuk meningkatkan kualitas manusia, ialah bahwa peningkatan kualitas tersebut sesungguhnya merupakan suatu mata rantai dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas nasional. Hal ini akan dapat dihasilkan melalui lembaga pendidikan. Manusia Indonesia yang berkualitas merupakan cerminan dari kepribadian yang baik yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari manusia produktif. Manusia produktif dapat ditandai dengan memiliki kreatifitas yang tinggi serta mempunyai kemampuan mandiri untuk menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri dan untuk orang lain, serta tidak bergantung pada sarana dan lapangan kerja yang ada.¹¹

Pendidikan memiliki tugas untuk mengubah sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia Indonesia yang bersumber daya. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus mengembangkan

⁷ Ujang Charda S., "Pendidikan Tinggi Hukum Mencetak sarjana Hukum *Homo Juridicus* dan *Homo Ethicus*", *Jurnal Wawasan Hukum Edisi Khusus*, STH Bandung, Bandung, 2006, hlm. 69.

⁸ *Ibid.*

⁹ Zainal Arifin Ahmadi, "Agenda Strategi Pendidikan Nasional dan Upaya Pengentasan Kemiskinan", *Makalah Seminar Nasional Kemiskinan di Indonsia dan Peran Lembaga Pendidikan dalam Pengantasannya*, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 1993, hlm. 1.

¹⁰ Ujang Charda, *Op. Cit.*, hlm. 71.

¹¹ Titin Suhartini, "Pengembangan Kualitas Tenaga Kependidikan", *Wawasan Tridharma Majalah Kopertis Wil IV No. 11 Tahun XVII, Juni 2005*, hlm. 12.

kemampuan nalar intelektual, emosional, sosial serta spiritual yang akan mengarah kepada kemampuan kecerdasan majemuk. Untuk itu diperlukan adanya suatu strategi pendidikan yang berupaya mengubah citra “*menjadi budak di negeri sendiri*” ke citra “*menjadi tuan di negeri sendiri*”, serta mengoptimalkan potensi anak berbakat, baik secara akademis maupun administratif.¹²

Melalui pendidikan, manusia dikaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangannya, untuk menyusun program serta strategi pemberdayaannya. Pendidikan sebagai perekayasa manusia, tidak seperti perekayasa non manusia, baik hayati maupun non hayati yang sifatnya mekanistik, melainkan harus menembus serta menulik lebih mendalam mengenal nalar intelektual, emosional, sosial serta spiritualnya. Manusia tidak hanya dibina serta dikembangkan kualitas fisik-biologisnya saja, melainkan juga kesadaran penghayatan masyarakat dan budaya, sampai pada tingkat religius yang meningkatkan kualitas akhlaknya.

Manusia menempati posisi penting dalam lembaga pendidikan sekaligus sebagai sumber daya utama yang menjadi penggerak ke arah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Manusia merupakan unsur terpenting, karena unsur yang lain seperti uang, materi, mesin, metode kerja, waktu dan kekayaan lainnya hanya dapat memberi manfaat jika manusia dalam lembaga pendidikan itu merupakan daya pembangunan dan bukan

perusak.¹³ Keberhasilan upaya pembangunan pendidikan berkaitan erat dengan kualitas manusia, yaitu manusia yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan pendidikan untuk pencapaian tujuan.

Kemajuan ekonomi dengan sendirinya sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kreativitas, etos kerja dan sifat inovatif yang tinggi. Gejala yang nampak dewasa ini adalah keberhasilan dalam bidang industri dan ekonomi menunjukkan dampak yang masih memperhatikan. Jenjang antara kebutuhan tenaga yang bermutu, keahlian yang tepat untuk kebutuhan industri dan perekonomian masih rendah. Jurang kemiskinan semakin dalam, pembagian lapangan kerja yang adil dan tepat semakin jauh. Terjadi pengangguran di segala sektor lulusan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Situasi semacam ini telah diupayakan perbaikannya walaupun hasilnya selalu dinantikan dengan sikap tidak sabar sebagai bagian dari sisi perkembangan teknologi, sektor ekonomi, mengharapakan tindakan perubahan motivasi pendidikan baik menengah maupun tinggi. Motivasi pendidikan tergantung atas seberapa jauh harapan diperlukan untuk pertumbuhan sektor ekonomi ini. Sebab dewasa ini motivasi tidak hanya semata memperbaiki metode dan memasang mata kuliah modern dalam kurikulum, akan tetapi lebih kepada pendirian sebagaimana dikemukakan oleh

¹² Diah Hadijah, “Pendidikan sebagai Aspek Budaya Memiliki Nilai Strategis dalam Membina Manusia yang Bersumber Daya”, *Wawasan Tridharma Majalah Kopertis Wil IV No. 8 Tahun XVIII, Juni 2006*, hlm. 3.

¹³ Euis Suherti, “Strategi Pengembangan SDM dalam Lembaga Pendidikan”, *Wawasan Tridharma Majalah Kopertis Wil. IV No. 9 Tahun XVIII, April 2006*, hlm. 59.

Mihali, yaitu *"a school open to the community, with a flexible curriculum and organization of learning and able to integrate internal and external school activities will be capable of accomplishing those tasks"*.¹⁴

Apabila dianalisis secara mendalam, maka pendidikan dituntut pandangan-pandangan baru seperti otonomi, *self-governement*, kemampuan *initiate*, bertanggung jawab, dan kreativitas, sehingga diharapkan akan memperoleh:¹⁵

- a. Tenaga kerja ahli dengan kualitas tinggi.
- b. Memperbaharui secara berkelanjutan profesi keahlian dan pengetahuan.
- c. Menyiapkan kepelatihan setiap kali timbul pembaharuan di bidang perdagangan dan industri.

Hal tersebut memberikan peluang untuk menumbuhkembangkan kesempatan pendidikan tinggi yang mengarah kepada kemampuan vokasional dan profesional yang tinggi dan mampu memodifikasi keterampilan dan pengetahuan yang umum dalam menyiapkan sumber daya manusia mengembangkan proses intelektual, sikap, nilai-nilai dan keterampilan, maka pendidikan tinggi juga harus mampu mendidik mahasiswa bidang ilmu apapun yang mereka pilih sebagai sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, mandiri dalam arti *self development* dan *self directing learning*, kemampuan kooperatif, sehat jiwa dan raga serta taqwa.

Peningkatan kualitas pendidikan

tinggi merupakan syarat untuk mempercepat terwujudnya masyarakat demokratis, karena masyarakat demokratis memerlukan anggota masyarakat mandiri. Dalam Pembukaan UUD 1945 ditekankan perlunya mewujudkan masyarakat yang cerdas dan masyarakat cerdas hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas. Dalam kaitan ini pendidikan yang berkualitas bukan hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik, tetapi perlu mengembangkan seluruh spektrum intelegensi manusia yang meliputi berbagai aspek kebudayaan. Pendidikan formal bukan hanya mengembangkan intelegensi skolastik, tetapi juga intelegensi emosional, interpersonal dan intra personal, serta lainnya.

Sistem pendidikan nasional harus memberi kesempatan untuk perkembangan spektrum intelegensi yang luas tersebut. Di samping itu, kunci utama peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah mutu para pengajar. Dalam kaitan ini bukan hanya diperlukan suatu reformasi mendasar dari pendidikan staf pengajar tetapi perlu penghargaan yang wajar terhadap profesi pengajar sebagaimana telah dilaksanakan di negara industri maju lainnya. Selain itu kehidupan global dalam dunia terbuka dengan perdagangan bebas serta kerjasama regional memerlukan manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang bisa bersaing dalam arti positif. Dalam persaingan, diperlukan

¹⁴ Mihali dalam Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 21.

¹⁵ *Idem*.

kualitas dapat berkompetisi. Kualitas yang baik dan terus meningkat hanya dapat diciptakan oleh manusia yang mempunyai kemampuan berkompetisi, yang dapat dihasilkan oleh pendidikan yang kondusif bagi lahirnya pribadi yang kompetitif.

Masyarakat atau individu yang berkompetisi dan dapat bekerjasama, dipacu oleh sikap inovatif yang merupakan paradigma baru. Suatu sistem pendidikan tinggi dapat menghasilkan tenaga pemikir yang berkembang, tetapi apabila tidak inovatif, maka kemampuan berpikirnya tidak akan mendapat makna dalam kehidupan bersama. Berkaitan dengan meningkatkan kualitas hasil pendidikan tinggi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dunia kerja, di samping itu perlu pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki, hal lain yang perlu diperhatikan antara lain adalah:¹⁶

- a. Pemberdayaan peranan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan *link & match*.

Keterkaitan (*link*) dan kesepakatan (*match*) pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja perlu dikaji secara cermat dan akurat, baik dalam penyusunan model program maupun keterandalan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya studi empirik melalui penelitian dan pengembangan. Diperlukan adanya penelitian evaluatif untuk mengeksplorasi model yang diawali dengan menelaah bahan kajian mata pelajaran khusus dalam kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan

oleh pekerjaan tertentu. Hasil dari telaah bahan kajian kemudian diuji melalui kegiatan penelitian di pendidikan tinggi untuk melihat keterandalan model program dan hasil yang dicapai. Hasil penelitian tindakan perlu dikembangkan terutama dalam proses implementasinya termasuk sumber daya yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan model.

Selanjutnya, bersama tenaga pengajar mengembangkan kurikulum, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan merancang penelitian yang berkaitan dengan model program pendidikan. Sejumlah kajian mata pelajaran tersebut hendaknya terkait (*link*) dan sepadan (*match*) dengan kebutuhan sehingga memberi kontribusi terhadap kemampuan dan sikap peserta didik terhadap tuntutan dunia kerja, misalnya etos kerja, disiplin, jiwa kewiraswastaan, dan lain-lain. Penelitian dan pengembangan dalam konteks lain adalah *link and match* program pendidikan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Penelitian tentang permasalahan *link and match* dan penelitian fokus lainnya seperti mutu, efisiensi dan efektivitas pendidikan perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pengajar/peneliti, untuk memberi sumbangan yang bermanfaat bagi

¹⁶ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 180-181.

institusi dan pembangunan pendidikan.

b. Penyempurnaan/pengembangan kurikulum

Salah satu tolok ukur hasilnya suatu pendidikan adalah banyaknya lulusan yang berkualitas, berhasil diterima di tempat kerja, bukan hanya berfokus pada jumlah mahasiswa yang berhasil lulus program pendidikan saja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kurikulum perlu disusun, disempurnakan/dikembangkan secara terus menerus berdasarkan hasil penelitian terhadap kualifikasi dari masing-masing profesi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atas dunia usaha. Kurikulum yang diberikan atau yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta pendidikan hendaknya selalui mutakhir, sesuai dengan tuntutan kebutuhan sehingga tidak akan ketinggalan oleh kemajuan dunia kerja, di samping itu perlu penyediaan sarana dan prasana yang lengkap dan mutakhir. Pendidikan tinggi seharusnya kreatif mengadakan pengembangan/ penyempurnaan kurikulum yang bermanfaat bagi siswa walaupun tetap berdasarkan desain kurikulum basional yang baku dan berkompentisi standar nasional. Memformat kurikulum berbasis kompetensi perlu memperhatikan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan ini berdampak terhadap kesiapan pendidikan tinggi mengimpelemtasikan di lapangan,

sehingga mempunyai kompetensi untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Kompetisi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang memiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa elemen-elemen kompetensi terdiri dari:¹⁷

- 1) Landasan kepribadian.
- 2) P e n g u a s a a n i l m u d a n keterampilan.
- 3) Kemampuan bekerja.
- 4) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- 5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Kurikulum ini merupakan perincian dari kompetisi utama, dan kurikulum ini suatu program studi lulusan.¹⁸

- 1) Dasar untuk mencapai kompetisi lulusan.
- 2) Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi.
- 3) Berlaku secara nasional dan internasional.
- 4) Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang.
- 5) Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁶ *Idem.*

penggunaan lulusan, sedangkan kompetisi pendukung dan kompetisi lain yang bersifat khusus dana gaya dengan kompetisi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggaraan program studi/lembaga pendidikan hendaknya selalu menaruh perhatian dan berusaha memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dunia kerja, agar dapat menyesuaikan realisasi proses belajar mengajar di lembaga pendidikan dengan kebutuhan di lingkungan kerja. Di samping itu, keseriusan dan kedisiplinan mahasiswa, mengajar dan menyelenggarakan pendidikan dalam melakukan proses belajar mengajar sangat menentukan keberhasilan program pendidikan agar para lulusan siap bersaing di tempat kerja. Di samping itu, upaya untuk menegakkan disiplin dan motivasi kehadiran perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait.

Penyempurnaan/pengembangan kurikulum, silabus dan materi perkuliahan perlu dilakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja masa kini, dan bahkan perlu mengantisipasi masa mendatang, dan kini bahkan perlu mengantisipasi masa mendatang. Hal penting lainnya adalah meningkatkan lingkungan

belajar yang efektif dan kondusif, sehingga dapat turut membekali dan menunjang siswa agar dapat kesempatan untuk bekerja dan mampu bersaing di tempat kerja.

c. Latihan kerja

Program pendidikan yang dipersiapkan untuk kepentingan latihan kerja umumnya dikembangkan dengan berlandaskan paradigma produktivitas. Ini berarti bahwa program latihan kerja harus dikembangkan atas dasar hasil pemikiran dan analisis yang mantap berdasarkan *input* dan *output* dari pemanfaatan sumber daya manusia. Untuk kepentingan tersebut, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- 1) Program latihan kerja harus disusun dan dikembangkan berdasarkan pendekatan kompetensi melalui spesifikasi kerja yang mendetail.
- 2) Program latihan kerja hendaknya memiliki kemampuan untuk menciptakan pemahaman dan pengakraban kerja yang akan dihadapi di dunia kerja.
- 3) Program latihan kerja harus memiliki kemampuan menjabarkan kemampuan genetik yang dimiliki peserta menjadi kemampuan spesifik yang sesuai dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan pada jabatan yang akan diisi peserta.
- 4) Program latihan kerja harus memiliki kemampuan menciptakan sumber daya manusia yang optimal pada

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 185.

bidang pekerjaan yang menjadi sasarannya.

Pelaksanaan program pelatihan kerja tetap harus berupa program yang sistematis, resolutif dan dinamis sesuai dengan gejolak yang dikembangkan dalam dunia kerja. Setiap program pendidikan dalam rangka latihan dan pengembangan hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut:²⁰

- 1) Program yang dikembangkan hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kerja tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu pasar kerja.
- 2) Program latihan kerja harus disesuaikan dengan tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dan bidang kerja yang bersangkutan.
- 3) Program latihan kerja yang dikembangkan hendaknya merupakan rangkaian yang terpadu dalam proses pendidikan latihan pengembangan sumber daya manusia dan berkelanjutan melalui tahap siap latih, terlatih, terampil, dan profesional.
- 4) Program latihan kerja yang dikembangkan dengan paradigma produktivitas, harus mampu mempersiapkan siswa yang siap pakai pada bidang pekerjaan tertentu. Dengan demikian sinkronisasi antara pembinaan mutu lulusan pendidikan dan mutu latihan akan sangat menentukan mutu sumber daya

manusia yang memasuki pasar tenaga kerja.

Penciptaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki kesanggupan menunjang program pembangunan dengan efektif serta efisien hanya mungkin dilaksanakan apabila dapat dikembangkan sistem pendidikan dan latihan kerja yang terkait dan sepadan, sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di dunia kerja. Latihan kerja merupakan suatu upaya pendidikan yang bertujuan membentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang spesifik guna melaksanakan pekerjaan pada bidang tertentu.

Berikutnya kehidupan global akan melahirkan kebudayaan global, dan dewasa ini dapat dilihat bahwa kebudayaan global telah mulai melanda kehidupan global yang tanpa batas. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tugas pendidikan nasional adalah mengembangkan identitas siswa agar menjadi bangsa Indonesia yang berbudaya, dengan penuh rasa percaya diri memasuki kehidupan global. Pendidikan memang bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang terdidik dan cerdas saja, tetapi yang lebih penting adalah menjadi manusia yang cerdas dan berbudaya.

Banyak faktor menentukan tingkat kualitas pendidikan, di samping tersedianya dana, sarana prasarana, juga tersedianya para penyelenggara yang mempunyai visi dan misi yang jelas, staf pengajar yang profesional, pemberdayaan sumber daya lainnya dan masyarakat

²⁰ *Ibid.*, hlm. 185-186.

yang aktif berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikannya. Peningkatan kualitas dalam era reformasi bukan hanya menjawab tantangan internal tetapi juga tantangan global. Menjawab tantangan internal seperti pengembangan kesatuan bangsa juga harus merupakan program dalam pendidikan. Dalam kaitan ini diperlukan informasi penyelenggaraan dan manajemen pendidikan nasional searah dengan kecenderungan desentralisasi pendidikan dan partisipasi masyarakat lokal, karena tanggung jawab pendidikan semakin berat dan semakin luas, sehingga menuntut peninjauan kembali visi dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Tantangan Dunia Kerja

Pendidikan tinggi hukum sebagai salah satu lembaga yang potensial yang dapat menyumbangkan pikirannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan. Kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah dan pengembangan kreativitas ilmiah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum ketenagakerjaan, karena perguruan tinggi justru memiliki kecenderungan untuk menghasilkan suatu pemikiran yang produktif. Oleh karena itu, tingkat pemahaman kalangan pendidikan tinggi hukum terhadap hukum ketenagakerjaan harus terus ditingkatkan, yakni salah satu

langkah yang harus ditempuh adalah harus terus menerus melakukan penelitian yang menghasilkan sesuatu yang potensial yang dilakukan secara selektif dan transparan.

Peranan pendidikan tinggi hukum sangat penting, karena sebagai lembaga ilmiah yang berfungsi untuk mengamalkan PITEKS, meningkatkan relevansi program perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membantu manusia dalam melaksanakan pembangunan, melaksanakan pola pembangunan wilayah/daerah serta badan lain yang terkait. Fungsi-fungsi ini mutlak harus dilaksanakan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah yang dituntut untuk lebih mampu menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap berbagai pandangan dan aspirasi hidup dalam masyarakat.

Peranan pendidikan tinggi hukum terdapat dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.²¹ Melalui dharma pendidikan, pendidikan tinggi hukum diharapkan dapat menempe dan menghasilkan SDM yang terampil yang mempunyai pengetahuan, sehingga nantinya akan disumbangkan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Melalui dharma penelitian, pendidikan tinggi hukum diharapkan mampu mengadakan inovasi yang berguna bagi pembangunan bangsa. Melalui ketiga dharma tersebut pendidikan tinggi hukum berperan sebagai motivator, mediator, *problem sover*, dan katalisator antara kepentingan

²¹ Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 91.

pemerintah di satu pihak dan kebutuhan masyarakat di lain pihak. Dengan demikian, pendidikan tinggi hukum sebagai wahana dan sekaligus wujud peranserta masyarakat ilmiah dalam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Melalui pendidikan inilah, maka diarahkan untuk menjadi bangsa yang maju dan modern, antara lain dicirikan oleh sikap menunjung tinggi profesionalisme, menghargai prestasi, efisiensi, memiliki etos kerja, berdisiplin serta memiliki kesadaran waktu yang tinggi, sadar PITEK, senantiasa memperbaharui diri melalui belajar.²² Michael Porter²³ dalam bukunya *Competitive Advantage*, menjelaskan bahwa bangsa yang kompetitif, siap bersaing antara lain didukung oleh sikap kritis terhadap mutu, mencintai produk bermutu, dan mengembangkan budaya bermutu. Kesiapan berkiprah sebagai bangsa yang berkompetitif dan memiliki “daya saing” harus ditunjukkan pula dalam penguasaan *high technology* secara mandiri, kemampuan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi kebutuhan pasar, terampil melakukan lobby dalam skala global.

Memasuki kompetisi global, masyarakat harus dikondisikan kritis terhadap mutu. Membangun sikap kompetitif memasuki area global, berarti

membangun sumber daya manusia handal, memiliki wawasan luas, profesional, memiliki etos kerja, berketerampilan, dan sekaligus *concern* terhadap kemajuan. Membangun sumber daya manusia berkualitas harus mengedepankan pembangunan pendidikan dalam konteks pembangunan nasional, karena melalui upaya pendidikan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dapat dikelola secara terencana, terukur dan sistematis.

Dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan global dewasa ini, pendidikan tinggi perlu mempersiapkan diri dalam berbagai aspek, baik aspek kurikulum, sarana dan prasarana, dana, sumber daya manusia, organisasi dan manajemen dan sebagainya. Kurikulum dapat didesain dengan baik, dan bergerak dengan kurikulum harus cepat, pengajar harus penuh kreativitas dan inovasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dalam persaingan, oleh karenanya harus ada kerjasama antara dunia usaha dengan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi harus siap menjadi *centre of excelent*, mempersiapkan masyarakat ke arah modernisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Andalan utama untuk membangun keunggulan kompetitif terfokus pada:

- a. Kualitas sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan

²² Bdgk. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 12, mengemukakan bahwa beberapa sifat masyarakat modern, yaitu : jujur, efisien, tepat waktu, teratur, rajin, hemat, rasional, penangguhan konmsi (penabungan). Bdgk. juga dengan Pendapat Mochar Lubis, *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982, hlm. 23-41, yang mengemukakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai sifat “hipokritis” (munafik) dan mempunyai ciri-ciri : segan bertanggung jawab, jiwa feodal, percaya takhayul, lain-lain seperti tidak hemat, malas, percaya takdir, sabar dan sebagainya.

²³ Michael Porter dalam Sedarmayanti, *Op. Cit.*, hlm. 187.

keterampilan secara langsung terlibat dalam proses produksi dan pemasaran. Dalam upaya membangun keunggulan kompetitif tantangan yang kita hadapi “*seberapa jauh sistem pendidikan nasional kita efektif membangun sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan dapat diandalkan sebagai faktor keunggulan kompetitif menghadapi persaingan global*”.

- b. Tantangan era industrialisasi. Sesuai dengan amanat sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa program industrialisasi akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Program industrialisasi memerlukan investasi, baik berupa modal dalam negeri maupun modal asing. Guna mempertahankan kelajuan pertumbuhan industrialisasi diperlukan dukungan tersedianya tenaga kerja terampil, dukungan infrastruktur, dan keamanan serta stabilitas politik.
- c. Tantangan era ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan ekonomi global telah menempatkan “PITEK mutakhir” sebagai faktor

keunggulan, sehingga banyak organisasi di negara maju menanamkan modalnya dalam penelitian dan pengembangan.

Dalam era globalisasi dan industrialisasi, peran pendidikan tidak terfokus, hanya pada penyiapan sumber daya manusia yang siap pakai saja, mengingat kecenderungan yang terjadi dalam dunia kerja sangat cepat berubah, maka sebaiknya pendidikan harus pula mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif, manusia menerima, menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Dampak yang ditimbulkan globalisasi dan industrialisasi terhadap pendidikan akan sangat kompleks mengingat pendidikan merupakan sarana untuk mengubah dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memahami perubahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupannya, mampu menyesuaikan dengan perubahan dan turut membantu mengarahkan perubahan tersebut.²⁴

Di sini tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan Indonesia, baik untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global.²⁵ Pendidikan di Indonesia harus peka pada peluang yang muncul sekaligus juga harus peka terhadap tantangan yang menghadang.²⁶ Karena itulah dalam era

²⁴ Dalam kaitannya dengan era globalisasi, maka kondisi ketenagakerjaan di masa yang akan datang harus berorientasi pada sistem pengembangan sumber daya manusia yang bersifat *multi skilling, flexibel, dan retainable* menuju kemampuan *enterpreneurship* dan *life long education* yang merupakan prinsip-prinsip pelatihan kerja yang perlu dijadikan pedoman dan dikembangkan agar para lulusan/pencari kerja dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan tuntutan perubahan zaman dunia kerja (*changing the world of work*). Lihat Joseph Stiglitz, “*We have to Make Globalization Work for All*”, The Jakarta Post, 22 Oktober 2003, hlm. 7.

²⁵ Mangatas Tampubolon, “Peradigma Baru Pendidikan Bermutu Berdasarkan Sistem *Broad Based Education* dan *High Based Education* Menghadapi Tantangan Abad Ke 21 di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan No. 034 Tahun ke 8, Januari 2002*.

globalisasi, diperlukan sumber daya manusia unggul dalam pengertian penguasai PITEKS, adaptif, kreatif, inovatif dan berkepribadian. Kekurangan atau kelemahan komponen dalam suatu sistem pendidikan, memerlukan penataan ulang, penyegaraan dan pengembangan sehingga mencapai efisiensi dan relevansi yang tinggi. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan tinggi, guna menghasilkan manusia unggul yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, maka sudah saatnya pendidikan dikelola sebagai suatu industri. Artinya pendidikan bukan lembaga yang sekedar mencari keuntungan maksimal, atau dunia yang steril, konservatif dan lamban mengantisipasi perubahan di dunia industri dan perkembangan PITEKS, melainkan diharapkan sebagai institusi yang dapat menyerap karakteristik positif dari kultur industri.

Beberapa alternatif yang dapat dikembangkan oleh pendidikan tinggi untuk menciptakan *link and match*, antara lain dalam bentuk tuntutan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan unit bisnis profesional yang terpisah dari unit akademik atau berafiliasi, untuk mencari peluang dan memenuhi kebutuhan industri.
- b. Mengembangkan program *extension* yang melayani jasa pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan PITEKS terbaru.
- c. Menetapkan perguruan tinggi dalam suatu jaringan teknostruktur industri.
- d. Melakukan deregulasi pengelolaan perguruan tinggi hukum.

Berdasarkan hal tersebut, setiap perguruan tinggi hukum perlu pengidentifikasian dan mengembangkan potensi serta keunggulan masing-masing, aktif mencari peluang yang bisa ditawarkan kepada industri. Misalnya meliputi keunggulan dalam kualitas dan spesialisasi lulusan, program pengembangan sumber daya manusia, kemampuan atau produk terbaru dari penelitian dan pengembangan. Dengan keunggulan ini, pendidikan tinggi hukum dapat menjalin kerjasama dengan industri dalam posisi kerjasama bisnis, bukan “bantuan” kerjasama. Nilai balikan dari bentuk kerjasama dapat digunakan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia. Segala yang berhubungan dengan pendidikan atau jenis prasarana sosial lainnya merupakan bagian dari teori investasi karena pendidikan membantu meningkatkan kapasitas produktif salah satu penyebab tidak terisinya lowongan pekerjaan tersebut adalah kurang memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang disyaratkan oleh pengguna tenaga kerja.²⁷ Pada umum yang dibicarakan adalah investasi di bidang sumber daya manusia dalam pengertian sempit, yaitu pendidikan

²⁶ Sam M. Chan & Tuti T. Sam, *Analisis SWOT : Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 113-114.

²⁷ Taruna, “Proyeksi Lulusan Mahasiswa Teknologi dan Kejuruan Tersedianya lapangan Kerja di Masa Mendatang”, *Makalah disajikan dalam rangka Dies Natalis UNDIP*, Semarang, 6 Agustus 1991, hlm. 3.

dan latihan, karena dapat lebih diukur dibandingkan dengan pengeluaran untuk pelayanan masyarakat. Sementara itu, dalam penginvestasian perlu juga pengembangan sumber daya manusia yang mencakup:

- a. Fasilitas dan pelayanan kesehatan yang pada umumnya diartikan sebagai pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan, stamina, tenaga, serta validitas rakyat.
- b. Latihan jabatan baik yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun yang diorganisasikan oleh perusahaan.
- c. Pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi.
- d. Migrasi perorangan dan keluarga yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.
- e. Bantuan teknis, keahlian dan konsultan.

Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan orang perorang atau pemanfaatan hasil-hasil pendidikan, akan tetapi lebih difokuskan kepada pemuasan berbagai kebijaksanaan pengembangan daya insani modal terpenting yang dimiliki suatu negara.²⁸

Pendidikan tinggi hukum merupakan lembaga yang berperan membentuk

manusia menjadi ahli di suatu bidang tertentu. Dari lembaga ini, tidak saja lahir para ilmuwan-ilmuwan kaliber dunia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lahir pula para cendekiawan yang kemudian menjadi teknokrat yang mampu merubah peradaban suatu bangsa bahkan peradaban dunia dan dari lembaga pendidikan tinggi ini pula, lahir karya-karya besar yang menjadi bahan baku penciptaan nilai-nilai ekonomi, sosial dan politik, kemasyarakatan, hukum dan nilai-nilai manajemen yang setiap saat bergerak maju.

Banyak kritik tajam yang ditujukan kepada pendidikan tinggi di Indonesia. Ada pakar yang menyebut bahwa dunia pendidikan di Indonesia kurang menganalisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity dan Threats*), dalam arti dunia pendidikan kita kurang berani melihat kekurangan dan kelemahan dirinya untuk dapat lebih memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Dunia pendidikan juga kurang peka dengan adanya *business reengineering* (perubahan bisnis yang cepat dan radikal). Dunia pendidikan, menurut para pakar, lebih senang kepada kemampuan dan regulasi yang berkepanjangan. Kurikulum yang sudah ketinggalan jaman dan muatan titipan lokal yang sangat dengan sarat, menyebabkan produk pendidikan Indonesia seperti "*lari cepat akan tetapi tetap di tempat*". Banyak perguruan tinggi mencetak lulusannya dengan kualitas intelektual yang belum memadai, terutama di bidang ilmu dasar. Kondisi ini pada

²⁸ Nulhaqim, *Situasi dan Masalah Sumber Daya manusia, Teknologi dan Pembangunan*, FE-UI, Jakarta, 2002.

gilirannya menyebabkan kita kehilangan peluang bisnis dan lapangan kerja bidang *manufacturing*, elektronika dan permesinan.²⁹

Rendahnya mutu tenaga kerja terdidik di Indonesia, antara lain menyebabkan beberapa perusahaan Jepang dan Korea membatalkan untuk membuka unit bisnisnya di Indonesia, karena sukarnya mendapatkan tenaga kerja terampil dengan *skill* yang standar. Rendahnya mutu lulusan perguruan tinggi juga menyebabkan ketidakmampuan untuk memasuki bisnis modern di pasar dunia. Para lulusan perguruan tinggi juga belum dapat secara efektif memanfaatkan berbagai peluang bisnis di pasar internasional. Kita lebih banyak menggunakan tenaga ahli asing ketimbang ekspor tenaga ahli, bahkan ekspor ide atau konsep sekalipun, belum dapat dilakukan. Jurnal-jurnal ilmiah internasional banyak dihiasi oleh karya pakar negara lain, sebuah fenomena buruk bagi pakar domestik yang patut dipikirkan terutama oleh pendidikan tinggi di Indonesia. Filipina misalnya dapat meraup devisa sebesar US\$ 5 miliar setahun dari tenaga kerja mereka yang bekerja di luar negeri, sementara Indonesia baru memperoleh US\$ 450 juta. Orang-orang Filipina memiliki "*competitive advantage*" di pasar global karena kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan memiliki banyak tenaga kerja terampil yang bekerja sebagai perawat dan montir.

Sebagai bahan perbandingan, apabila

tenaga kerja Filipina yang berijazah SLTA bekerja di Indonesia, kadang mereka memperoleh gaji yang lebih besar dari seorang lulusan magister (S2) domestik, bila bekerja pada instansi yang sama. Salah satu sebabnya adanya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Ini merupakan suatu bukti bahwa nilai tenaga kerja terdidik Indonesia yang bekerja di dalam negeri kurang mendapat penghargaan yang sepadan dengan keilmuannya. Dari sistem pendidikan di Indonesia, suatu hal yang pantas untuk dipertanyakan adalah apakah sistem pendidikan mampu menciptakan usahawan-usahawan yang berorientasi pada bisnis dan memiliki potensi sebagai wiraswasta? Semangat wirausahawan yang menjadi urat nadi pengembangan bisnis nampaknya belum merupakan bagi yang menjadi muatan utama kurikulum di setiap jenjang pendidikan, termasuk di Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum.

Perlu disadari bahwa dunia bisnis yang maju adalah bisnis yang *dimanage* oleh para pelaku yang memiliki kemampuan sebagai *entrepreneur*. Seorang *entrepreneur* harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan, mempunyai intuisi yang kuat, mempunyai kesadaran mental, mempunyai jiwa kepemimpinan dan pemberontak sosial dalam konteks manajemen. Sementara seorang *interpreneur* atau sering dijuluki dengan *entrepreneur plus*, selain memiliki potensi sebagaimana yang dimiliki oleh seorang *entrepreneur*, juga memiliki

²⁹ Singgih Riphath, "Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Pasar Modal : Persiapan Menuju Era Global", *Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 173.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 185.

kemampuan sebagaimana disebutkan oleh Donald and Hodgetts³⁰ sebagai *putting internal resources first* (pengembangan sumber daya untuk memacu bisnis secara sukarela). Mampukah dunia pendidikan menatap masa depan dengan ketajaman kurikulumnya dan menyesuaikan lingkungan akademis dengan tuntutan bisnis, sehingga secara sinerjik bersama dunia usaha membangun manusia-manusia Indonesia yang unggul, yang memiliki semangat sebagai *interpreneur*? Inilah sebuah harapan besar masyarakat dan bangsa Indonesia yang harus dijawab Indonesia menuju kepada kemakmuran yang berkeadilan.

C. Penutup

Pendidikan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan yang berperan membentuk manusia menjadi ahli di suatu bidang tertentu yang ditempuh dengan melakukan mengembangkan kurikulum, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan merancang penelitian yang berkaitan dengan model program pendidikan. Sejumlah kajian mata kuliah hendaknya terkait (*link*) dan sepadan (*match*) dengan kebutuhan, sehingga memberi kontribusi terhadap kemampuan dan sikap peserta didik terhadap tuntutan dunia kerja, misalnya etos kerja, disiplin, jiwa kewiraswastaan, dan lain-lain. Dalam konteks lain adalah *link and match* program pendidikan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan lingkungan sosial, budaya dan alam

sekitar, sehingga pendidikan ini harus mampu mewujudkan diri sebagai *agent of change* atau pembawa pembaharuan dalam mempengaruhi masyarakat sebagai bentuk rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (*social planning*) yang mengarah pada pembentukan insan yang *rakhmatan lil'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Detama, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, UGM Press, 1990.
- Diah Hadijah, "Pendidikan sebagai Aspek Budaya Memiliki Nilai Strategis dalam Membina Manusia yang Bersumber Daya", *Wawasan Tridharma Majalah Kopertis Wil IV No. 8 Tahun XVIII, Juni 2006*.
- Donald, Kuratko F. & R.M. Hodgetts, *Enterprenurship : A Contemporary Approach, Second Edition*, The Dryden Press-Orlando, 1992.
- Euis Suherti, "Strategi Pengembangan SDM dalam Lembaga Pendidikan", *Wawasan Tridharma Majalah Kopertis Wil. IV No. 9 Tahun XVIII, April 2006*.
- Jhing Han, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (terjemahan D. Guritro), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.

³⁰ Donald, Kuratko F. & R.M. Hodgetts, *Enterprenurship: A Contemporary Approach, Second Edition*, The Dryden Press-Orlando, 1992, hlm. 27.

- Joseph Stiglitz, "We have to Make Globalization Work for All", The Jakarta Post, 22 Oktober 2003.
- Mangatas Tampubolon, "Peradigma Baru Pendidikan Bermutu Berdasarkan Sistem *Broad Based Education* dan *High Based Education* Menghadapi Tantangan Abad Ke 21 di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan No. 034 Tahun ke 8, Januari 2002*.
- Mochar Lubis, *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nulhaqim, *Situasi dan Masalah Sumber Daya manusia, Teknologi dan Pembangunan*, FE-UI, Jakarta, 2002.
- Sam M. Chan & Tuti T. Sam, *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sanusi, *Struktur Ketenagakerjaan di Indonesia*, LDFE-UI, Jakarta, 1989.
- Sayidiman Suryohadiprodo, *Studi Mutu Pendidikan Dasar*, Pusat Infomatika Balitbang Depdikbud, Jakarta, 1991.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- , *Good Governance (Kepemimpinan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Singgih Riphath, "Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Pasar Modal: Persiapan Menuju Era Global", *Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Taruna, "Proyeksi Lulusan Mahasiswa Teknologi dan Kejuruan Tersedianya lapangan Kerja di Masa Mendatang", Makalah disajikan dalam rangka Dies Natalis UNDIP, Semarang, 6 Agustus 1991.
- Titin Suhartini, "Pengembangan Kualitas Tenaga Kependidikan", *Majalah Wawasan Tridharma Kopertis Wil IV No. 11 Tahun XVII, Juni 2005*.
- Udin S. Saud, "Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Penyediaan SDM untuk Pembangunan Berbasis Gotong Royong di Kabupaten Subang", Orasi Ilmiah pada Wisuda I UNSUB, Subang, 19 April 2006.
- Ujang Charda S., "Pendidikan Tinggi Hukum Mencetak sarjana Hukum *Homo Juridicus* dan *Homo Ethicus*", *Jurnal Wawasan Hukum Edisi Khusus*, STH Bandung, Bandung, 2006.
- Zainal Arifin Ahmadi, "Agenda Strategi Pendidikan Nasional dan Upaya Pengentasan Kemiskinan", Makalah Seminar Nasional Kemiskinan di Indonesia dan Peran Lembaga Pendidikan dalam Pengentasannya, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 1993.